



LAPORAN KINERJA 2020



DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS SOSIAL

Kompleks Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. /Fax (0266) 245996/245997
SUKABUMI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Kami sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2020.

Laporan Kinerja ini merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama satu tahun anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, bahwa secara kelembagaan SOTK Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Sosial.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) ini dapat menjadi pedoman dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan dan penetapan kebijakan program kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya.

Sukabumi, Februari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKABUMI,



[Handwritten Signature]

Ir. Teja Sumirat, MM
Pemuda Utama Muda / IV.c
NIP. 19660330 199303 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Dinas Sosial kepada publik sebagai pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Sosial.

Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dinas yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang. Pencapaian sasaran strategis dalam Tahun 2020, walaupun belum seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal, namun secara umum telah berhasil mewujudkan keseluruhan sasaran strategis yang ditetapkan.

Keberhasilan ini secara langsung maupun tidak langsung telah mendongkrak tingkat capaian pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2020. Pencapaian sasaran strategis sampai dengan Tahun 2020 dari RENSTRA Tahun 2016-2021 Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dapat digambarkan sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2020		Capaian %
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	%	0,13	0,06	43,09

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2020		Capaian %
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya	%	0,83	0,18	22,15
3	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	4,36	3,54	81,25
4	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial	%	21,12	21,10	99,86

Optimalisasi pencapaian sasaran strategis dan indikator secara umum karena adanya dukungan program Pemerintah Pusat melalui Kemensos RI dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial. Sedangkan keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi merupakan hambatan atau kendala untuk mencapai target capaian sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi berharap agar Pemerintah Daerah dapat lebih memprioritaskan pembangunan daerah dalam urusan sosial dengan penganggaran belanja yang lebih optimal khususnya sesuai dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	I
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4 Dasar Hukum	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	34
3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2020	34
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	39
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah / Renstra PD	44
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional	47
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan	49
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
3.1.7. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	53
3.2 Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Simpulan	68
4.2 Saran	69

Lampiran

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2020	4
Tabel 2.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial 2016-2021.....	8
Tabel 2.2 Target Kinerja Berdasarkan RPJMD/RENSTRA PD 2016-2021.....	15
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	16
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi 2016-2021 Perubaha.....	17
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Sukami.....	19
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Perubahan-I.....	21
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Perubahan Ke-II.....	23
Tabel 2.8 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Daerah Terhadap IKU Dinas Sosial.....	25
Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Per-Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020.....	27
Tabel 2.10 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis.....	32
Tabel 3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2020.....	34
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir.....	39

Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja S/D Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah.....	44
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Nasional.....	47
Tabel 3.5	Pencapaian Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2020.....	49
Tabel 3.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	52
Tabel 3.7	Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja.....	53
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi tidak semata bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melainkan juga mengarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan demokratis yang dilandasi nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Prinsip *Clean Government* dan *Good Governance* dalam reformasi birokrasi merupakan dua hal penting yang menjadi landasan dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Diharapkan hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tentunya dapat menunjang keberhasilan pembangunan Nasional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Maka kedudukan Dinas ini adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun yang menjadi tugas pokok dinas sosial yaitu melaksanakan urusan pemerintah diantaranya :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- 2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- 3) Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di kesekretariatan; bidang perlindungan dan jaminan sosial; bidang

- rehabilitasi sosial; bidang pemberdayaan sosial; kelompok jabatan fungsional; dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
- 4) Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
 - 5) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 7) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - 9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Laporan Kinerja tahun 2020 merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja menggunakan pendekatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) dimaksudkan untuk menyampaikan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan tujuan penyusunan laporan kinerja tahun 2020 adalah :

- a) Sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran tahun 2020;
- b) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- c) Sebagai evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh DPA Tahun 2020;
- d) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

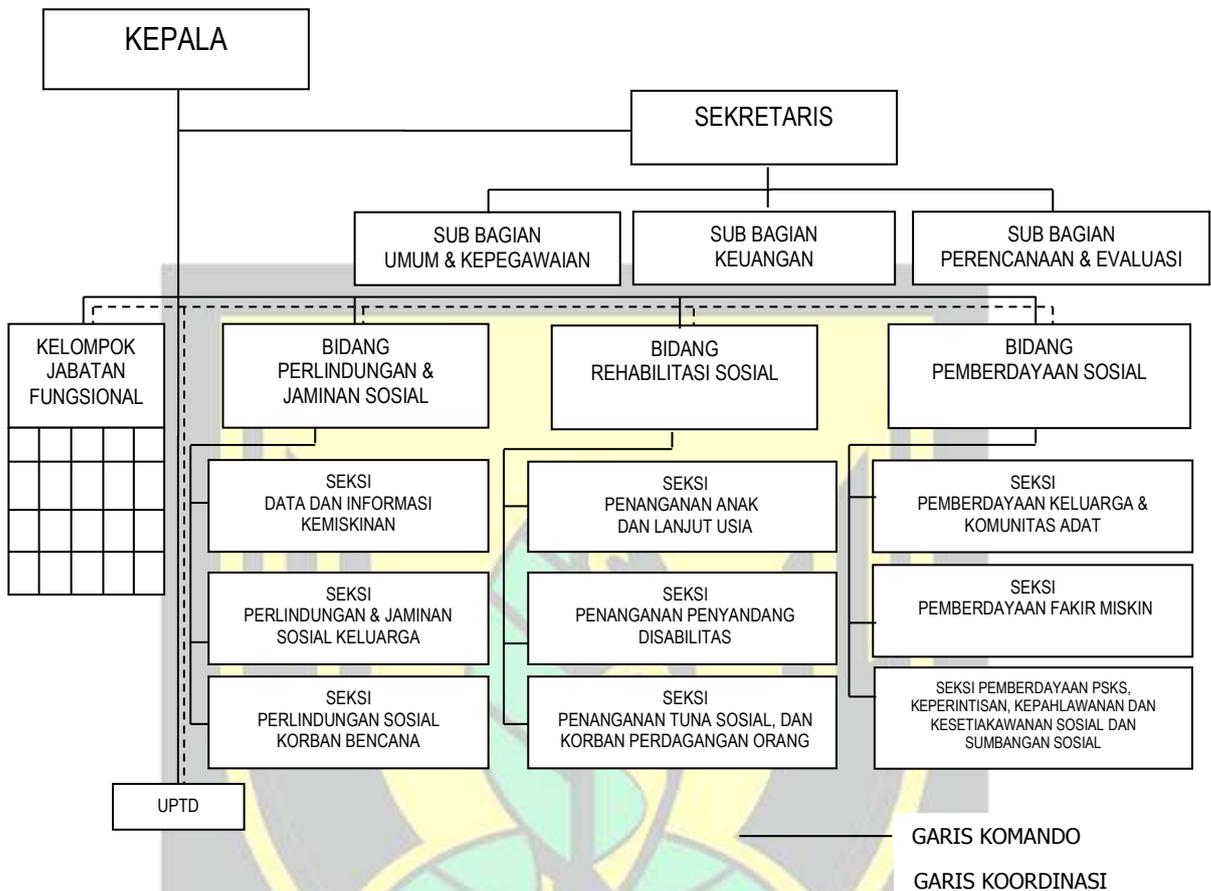
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat. membawahkan:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. membawahkan:
 - Seksi Data dan Informasi Kemiskinan;
 - Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;
 - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
- 4) Bidang Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial. membawahkan :
 - Seksi Penanganan Anak dan Lanjut Usia;
 - Seksi Penanganan Penyandang Disabilitas;
 - Seksi Penanganan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- 5) Bidang Pemberdayaan Sosial. membawahkan:
 - Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat;
 - Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Keperintisan. Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dan Sumbangan Sosial.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi dapat disajikan dalam gambar di bawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI**
(Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016)



Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi
Tahun 2020

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Kepala Bidang	
	a. Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial	1 orang
	b. Bidang Rehabilitasi Sosial	0 orang
	c. Bidang Pemberdayaan Sosial	1 orang
4.	Kepala Sub Bagian	2 orang
5.	Kepala Seksi	9 orang

No.	Jabatan	Jumlah
6.	Staf / Pelaksana	
	a. Staf Gol. IV	- orang
	b. Staf Gol. III	10 orang
	c. Staf Gol. II	0 orang
	d. Staf Gol. I	1 orang
	e. Staf Non-PNS	28 orang
	Jumlah	54 orang

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Tahun 2020

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 mengacu pada :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Peresiden Nomor 28 Tahun 2014 Tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja. pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja instansi pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Daerah dan Indikatir Makro Rencana pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Berita Daerah kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Indikasi Rencana Perogram Perioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi bahwa Dinas Sosial;
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2017. tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
13. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Ditetapkannya Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, maka perangkat daerah harus menyesuaikan dokumen perencanaan terhadap keselarasan dokumen dengan penetapan yang lebih tinggi. Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi menyelaraskannya sehingga tujuan dan sasaran beserta indikatornya.

Pencapaian Visi dan Misi dalam Rencana Strategis Dinas Sosial mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. **VISI** Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”**.

Kemudian Visi pembangunan dijabarkan melalui **Misi** Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Perubahan tujuan dan sasaran Dinas Sosial yang merubah Rencana Strategis Dinas Sosial tersebut telah menjadi acuan pedoman dalam pelaksanaan tatakelola pemerintahan dengan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan lainnya. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perubahan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial 2016-2021

RENCANA STRATEGIS AWAL					RENCANA STRATEGIS SETELAH PERUBAHAN				
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1	Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial dan Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Sosialnya	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan. Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Bimbingan. Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat;	1	Mewujudkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Sejahtera	Persentase PMKS yang tertangani	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial
2	Kesetiakawanan Sosial	Jumlah Penyuluhan Sosial Masyarakat dan Pengembangan Nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Demi Terbangunnya Kesejahteraan Sosial	Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas. Tuna Sosial. Anak Nakal Korban Narkotika	Bimbingan. bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan. Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	2			Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya
3		Jumlah Penanganan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk Meningkatkan Keberfungsian Sosialnya		Bimbingan. Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas. Tuna Sosial. ANKN. ODHA. ABH dan BWBLP;					

RENCANA STRATEGIS AWAL					RENCANA STRATEGIS SETELAH PERUBAHAN				
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
4		Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial bagi WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosialnya	(ANKN). Anak Jalanan. ODHA. ABH. BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah. Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	Penanganan WNI-Migran Bermasalah. Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan					
5		Jumlah Pelayanan Terhadap Masyarakat Miskin Melalui Layanan Rujukan Terpadu untuk Meningkatkan Jaminan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan. Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS;	3			Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial
6		Jumlah Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya		Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga. Anak. Lanjut Usia. Disabilitas Berat) dan Korban Bencana	4			Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial
7	Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos. PSM. Karang Taruna. Tagana. Keluarga Pioner. WPKS. Penyuluh Sosial Masyarakat. TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	5			Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

RENCANA STRATEGIS AWAL					RENCANA STRATEGIS SETELAH PERUBAHAN				
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
8				Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS. LK3. WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6			Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



Langkah strategis yang telah ditetapkan melalui penjabaran Misi Kepala Daerah yang menjadi kebijakan pembangun daerah mengacu pada target dan indikator kinerja sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 untuk Dinas Sosial mengacu pada pencapaian misi ke-2 yaitu **“Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius”**. Dalam pencapaian misi ke-2. yang memiliki tujuan pembangunan **“Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius”** dengan indikator tujuan daerah “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”. Sasaran strategis prioritas daerahnya “Meningkatnya penanganan PMKS” dengan indikator “Persentase PMKS yang tertangani”. Sasaran strategis daerah tersebut menjadi tujuan dalam RENSTRA Dinas Sosial.

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tujuan

Mewujudkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Sejahtera

Indikatornya :

Persentase PMKS yang tertangani

2.1.2 Sasaran

Meningkatnya penanganan PMKS

Indikatornya :

1. Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial;
2. Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya;
3. Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial;
4. Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial;

5. Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pencapaian tujuan dan sasaran ditunjang oleh program prioritas Dinas Sosial yaitu sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan. Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS).

- Isu Strategis
Sangat tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus ditangani dan semakin menurunnya pelestarian dan penghargaan terhadap unsur keperintisan. kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
- Latar Belakang
Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kemampuan. keberdayaan sosial dan kualitas hidup keluarga Fakir Miskin. Komunitas Adat. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan penghargaan terhadap unsur keperintisan. kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
- Rasional (Inovasi Kreatif Uraian Singkat Urgensi Program)
Perlu adanya peningkatan dan fokus penanggulangan kemiskinan baik dari pemerintah maupun swasta terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penghargaan terhadap unsur keperintisan. kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sehingga akan terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk. veteran serta PKRI.

b. Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Isu Strategis
Masih tingginya Jumlah Penyandang Disabilitas. Tuna Sosial. dan ANKN.ODHA. ABH. BWBLP dan WNI-Migran. Korban

perdagangan orang dan Korban Tindak Kekerasan yang belum tertangani;

- Latar Belakang

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan dan tanggung jawab serta peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungannya terutama penyandang disabilitas, tuna sosial dan ANKN/NAPZA, ODHA, ABH BWBLP dan WNI-Migran. Korban perdagangan orang dan Korban Tindak Kekerasan;

- Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)

Perlu adanya peningkatan dari semua pihak tanpa terkecuali dari pemerintah terhadap penanganan permasalahan sosial terutama penyandang disabilitas, tuna sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP serta WNI-Migran. Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Isu Strategis

1. Masyarakat miskin membutuhkan pelayanan dan rujukan yang terpadu sehingga semua program dapat dengan mudah diakses;
2. Masyarakat miskin membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial demi layaknya kehidupan yang adil, merata dan sejahtera;

- Latar Belakang

Program ini bertujuan untuk memberikan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dalam program perlindungan jaminan sosial masyarakat sehingga masyarakat akan dengan mudah mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial;

- Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)

Perlindungan dan jaminan sosial akan memberikan layanan dan jaminan bagi masyarakat miskin baik kategori sangat miskin maupun rentan miskin untuk mendapatkan pelayanan

perlindungan dan jaminan sosial. Masyarakat miskin adalah tanggungjawab bersama dalam memberikan penghidupan dan kehidupan yang layak tanpa terkecuali.

d. Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

- Isu Strategis

Masih rendahnya penggalian pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menunjang pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Sukabumi.

- Latar Belakang

Bertujuan untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan bagi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.

- Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)

Perlu adanya program kegiatan yang memberdayakan PSKS.

Selengkapnya tujuan dan sasaran dan target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 setelah dilakukannya perubahan Rencana Strategis dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Target Kinerja Berdasarkan RPJMD / RENSTRA PD 2016 – 2021

TUJUAN (1)	INDIKATOR TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	SATUAN (5)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2021 (11)
Mewujudkan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Sejahtera	Persentase PMKS yang tertangani	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	%	0.06	0.06	0.07	0.12	0.13	0.13
			Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya	%	0.44	0.47	0.51	0.55	0.83	0.98
			Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	0.49	0.52	0.49	4.34	4.36	4.36
			Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial	%	2.70	2.83	2.95	21.13	21.12	21.13
			Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	12.70	13.18	13.50	18.31	19.90	19.90
			Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	2.07	2.07	2.07	9.09	9.09	9.09

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Sejahtera	Persentase PMKS yang tertangani	Meningkatnya penanganan PMKS	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial; - Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya; - Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial; - Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial - Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; - Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 	Peningkatan kualitas serta profesionalisme pelayanan sosial, rehabilitasi, bantuan sosial dan perlindungan sosial, dan pelestarian K2KS;	Meningkatkan pembinaan pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial;

Setelah ditetapkan strategi dan arah kebijakan, kemudian ditetapkan indikator kinerja utama perangkat daerah atau disebut dengan IKU PD. Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Adapun yang menjadi indikator kinerja utama dinas sosial setelah perubahan adalah :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI**

1. Nama Organisasi : **DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI**
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.
3. Fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - b) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
 - c) Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di kesekretariatan, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, kelompok jabatan fungsional, dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
 - d) Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
 - e) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI
2016-2021 PERUBAHAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang Seharusnya Mendapatkan Pemberdayaan Sosial}} \times 100$	Dinas Sosial
2	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya	%	$= \frac{\text{Jumlah PMKS yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang Seharusnya Mendapatkan Rehabilitasi Sosial}} \times 100$	Dinas Sosial
3	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Layanan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang Terdaftar dalam Akses Layanan Jaminan Sosial}} \times 100$	Dinas Sosial
4	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Layanan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang Terdaftar dalam Layanan Jaminan Sosial}} \times 100$	Dinas Sosial
5	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah PSKS Perorangan yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan}}{\text{Jumlah PSKS Perorangan yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan}} \times 100$	Dinas Sosial

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
				Sosial Jumlah PSKS Perorangan Terdaftar	
6	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah Lembaga PSKS yang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial}}{\text{Jumlah Lembaga PSKS Terdaftar}} \times 100$	Dinas Sosial

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah janji pimpinan PD yang akan dicapai selama satu tahun yang merupakan penjabaran pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA PD dengan target-target yang ditentukan dan harus dicapai selama satu tahun. Adapun pernyataan perjanjian kinerja kepala dinas sosial dalam mewujudkan target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
3	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %
4	Meningkatnya Penangan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan	0,13%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Sosial	
5	Meningkatnya Penangan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya	0,83%
6	Meningkatnya Penangan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	4,36%
7	Meningkatnya Penangan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial	21,12%
8	Meningkatnya Penangan PMKS	Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	19,90%
9	Meningkatnya Penangan PMKS	Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	9,09%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Rp. 725.000.000,-	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Rp. 410.000.000,-	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Rp. 170.000.000,-	

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
4. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS).	Rp. 630.000.000,-	
5. Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	Rp. 1.990.750.000,-	
6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.	Rp. 5.380.000.000,-	
7. Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.	Rp. 1.375.000.000,-	

Perjanjian Kinerja perubahan ke - ii dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI
PERUBAHAN KE – II

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
3	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %
4	Meningkatnya Penangan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	0,13%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Meningkatnya Penangan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya	0,83%
6	Meningkatnya Penangan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	4,36%
7	Meningkatnya Penangan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial	21,12%
8	Meningkatnya Penangan PMKS	Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	19,90%
9	Meningkatnya Penangan PMKS	Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	9,09%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Rp. 544.685.000,-	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Rp. 388.405.000,-	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Rp. 18.790.000,-	
4. Program Pemberdayaan	Rp. 154.875.000,-	

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS).		
5. Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	Rp. 282.121.000,-	
6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.	Rp. 2.606.355.000,-	
7. Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.	Rp. 772.224.050,-	

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2020

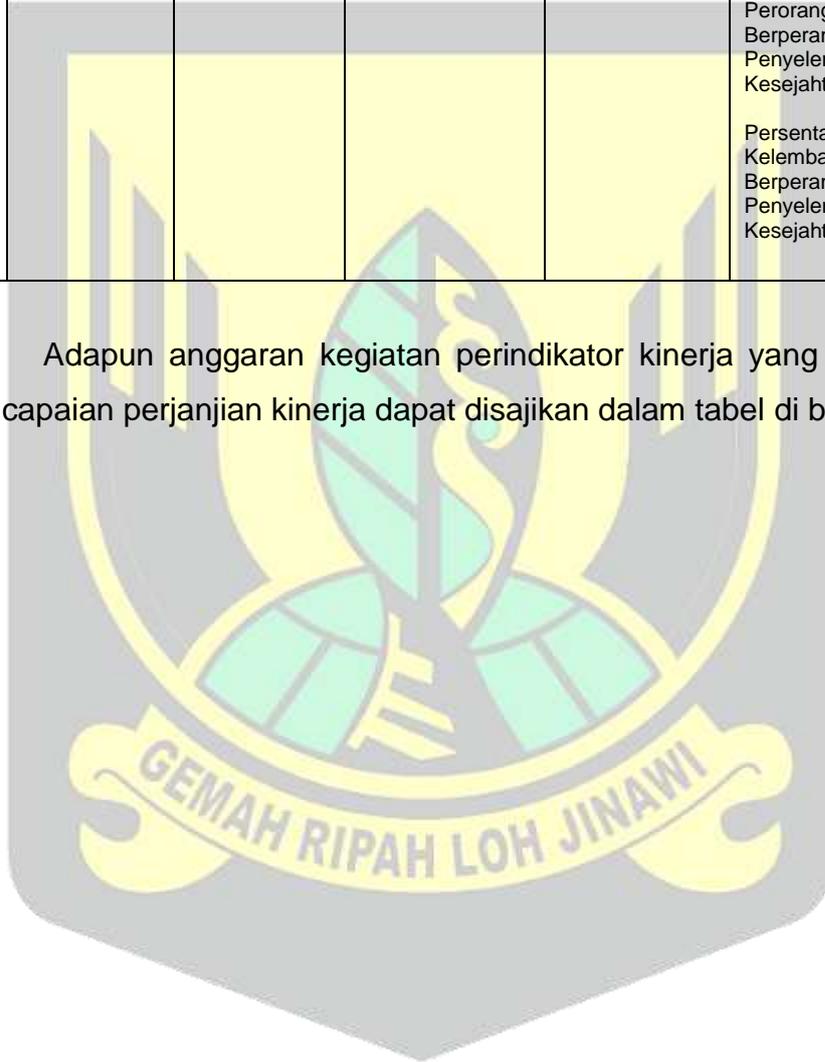
Sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja perubahan 2020. jumlah sasaran yang dilaksanakan sebanyak 4 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja. Sasaran program rutin sebanyak 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran dan 1 sasaran strategis merupakan sasaran pembangunan daerah dengan 6 indikator kinerja. Keselarasan Tujuan dan Sasaran strategis yang merupakan IKU Daerah terhadap IKU Dinas Sosial disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.7
Keselarasn Tujuan dan Sasaran Daerah
Terhadap IKU Dinas Sosial

Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Religius (M2)					
IKU Pemerintah Daerah			IKU Dinas Sosial		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Mewujudkan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Sejahtera	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial; Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi

<p>yang religius (T2)</p> <p>Indikator : <i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i></p>			<p>Indikator : <i>Persentase PMKS yang tertangani;</i></p>		<p>Sosialnya;</p> <p>Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial;</p> <p>Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial;</p> <p>Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p>
---	--	--	--	--	--

Adapun anggaran kegiatan perindikator kinerja yang menunjang pencapaian perjanjian kinerja dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :



Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Per-Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020

Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Religius							
Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Kinerja 3	Tahun 2020				
			Satuan 4	Target 5	Program 6	Kegiatan 7	Anggaran Rp. 8
	1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik;	1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;	%	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Pelayanan Administrasi Perkantoran;	544.685.000
		2. Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur;	%	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	388.405.000
	2. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan					Pemeliharaan Rutin/Berkala AC;	81.055.000
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;	4.350.000
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;	70.000.000
	2. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan	3. Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan;	%	100	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer;	220.000.000
						Penataan dan Pengamanan Arsip;	5.000.000
						Penyusunan Dokumen	8.000.000
							18.790.000
							3.540.000

Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Religius							
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020				
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Keuangan Yang Akuntabel				dan Keuangan	Perencanaan Kinerja;	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan;	3.240.000
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;	5.000.000
						Penyusunan Laporan Keuangan;	4.500.000
						Monitorin Evaluasi Kegiatan;	0
						Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).	2.510.000
Mewujudkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Sejahtera	3. Meningkatkan penanganannya PMKS	4. Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial;	%	0,13%	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan. Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS);		154.875.000
						Pemberdayaan Fakir Miskin;	8.601.000
						Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);	10.000.000
						Pemberdayaan Warga Komunitas Adat;	710.000
						Pemberdayaan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis;	1.040.000
						Diseminasi Program Kesejahteraan Sosial;	84.320.000
						Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan	52.574.000

Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Religius							
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020				
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya;	%	0,83%	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;	dan Kesetiakawanan Sosial;	282.121.000
						Bimbingan Sosial Restorasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;	3.450.000
						Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Nakal Korban Narkotika/NAPZA;	62.700.000
						Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas;	50.000.000
						Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial;	119.031.000
						Penanganan Anak Jalanan dan Remaja Putus Sekolah;	2.180.000
						Pelayanan Rehabilitasi Sosial WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;	2.960.000
						Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar;	41.800.000
						Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Sosial (DAK Reguler Tahun 2020);	0

Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Religius							
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020				
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial;	%	4,36%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;		355.000.000
						Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);	19.000.000
						Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT/SELARAS) bagi Masyarakat Miskin;	237.000.000
						Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Penerima Program Perlindungan Sosial;	99.000.000
		7. Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial;	%	21,12%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;		2.251.355.000
						Pembinaan bagi Lanjut Usia Terlantar;	72.000.000
						Penunangan Program Keluarga Harapan (PKH);	1.434.000.000
						Penunangan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, ODKB dan Anak Terlantar;	14.355.000
						Penanganan Korban Bencana;	481.000.000
						Penunangan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai;	250.000.000

Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Religius							
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020				
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		8. Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;	%	19.90%	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;	377.779.750
						Pembentukan Satgas Kesetiakawanan Sosial Tk. Desa Kabupaten Sukabumi;	115.874.750
						Pembinaan Anggota Tagana Kabupaten Sukabumi;	0
						Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);	90.700.000
							171.205.000
		9. Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	%	9,09%	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;		394.444.300
						Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;	2.800.000
						Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);	50.380.000
						Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA);	0
						Pelayanan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kedaruratan Bidang Sosial)	341.264.300

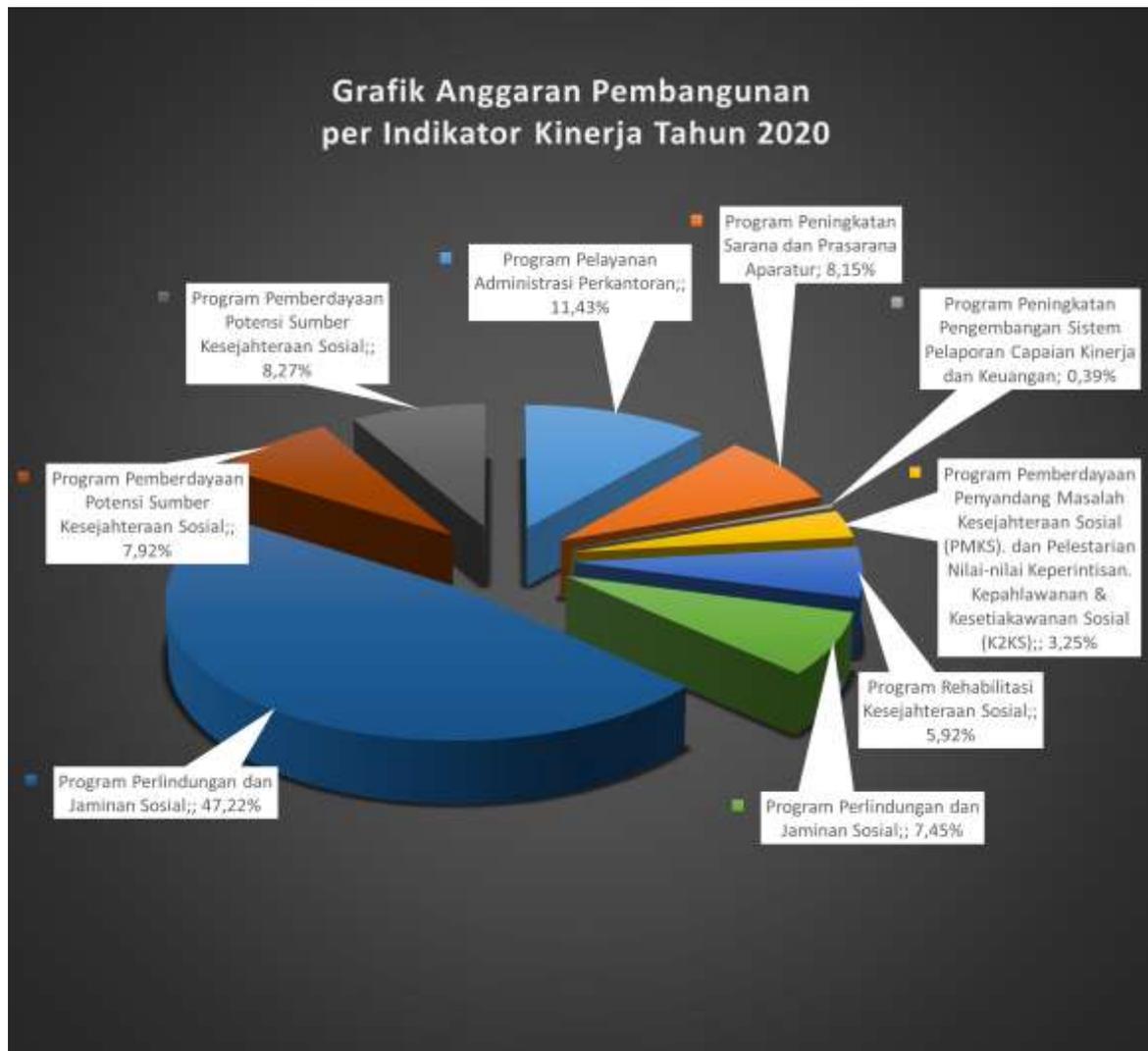
Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, maka perlu adanya rencana aksi pencapaian target kinerja yang akan dicapai setiap triwulan. Adapun rencana aksi pencapaian target kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi adalah sebagaimana diuraikan *lampiran rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2020*.

Persentase anggaran per indikator sasaran disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.9
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	544.685.000	11,43
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	388.405.000	8,15
3	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah	18.790.000	0,39
4	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	154.875.000	3,25
5	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya	282.121.000	5,92
6	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	355.000.000	7,45
7	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial	2.251.355.000	47,22
8	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	377.779.750	7,92
9	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	394.444.300	8,27

Jika ditampilkan dalam grafik adalah sebagai berikut :



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja terhadap target RPJMD 2016-2021. Pengolahan data capaian kinerja berdasarkan realisasi yang didukung oleh anggaran yang masuk dalam DPA perangkat daerah dan capaian kinerja sasaran kegiatan penanganan yang dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2020

Sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial dan realisasi atas pencapaian kinerja dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2020		% Realisasi
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	%	0,13	0,06	42,39
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya	%	0,83	0,18	22,15
3	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	4,36	3,54	81,25
4	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial	%	21,12	21,16	100,18

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2020		% Realisasi
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
5	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	19,90	10,16	51,04
6	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	9,09	0,41	4,55

Jika dilihat dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa dari sasaran strategis Meningkatkan penanganan PMKS dengan 6 indikator kinerja dengan realisasi kinerja mencapai realisasi di dibawah 100%. Capaian realisasi digambarkan dengan grafik sebagai berikut :



Dari tabel dan grafik di atas dapat diuraikan bahwa Sasaran **Meningkatnya penanganan PMKS** adalah sebagai berikut :

1. Indikator “*Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial*” dengan target indikator ini sebanyak 0.13% (1.425 orang) terealisasi sebanyak 0,06% (604 orang) atau 42,39% dari jumlah yang harus diberdayakan sebanyak 1.079.563 orang. Pencapaian

target terhadap realisasi tahun 2020 dapat disajikan dalam grafik di bawah ini :



2. Indikator “*Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya*” dengan target indikator ini sebanyak 0,83% (605 orang) terealisasi sebanyak 0,18% (134 orang) atau 22,15% dari jumlah yang harus direhabilitasi sebanyak 73.077 orang. Pencapaian target terhadap realisasi tahun 2020 dapat disajikan dalam grafik di bawah ini :



3. Indikator “*Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial*” dengan target indikator ini sebanyak 4,36% (7.500 orang) terealisasi sebanyak 3,54% (6094 orang) atau 81,25% dari jumlah yang harus mendapatkan layanan akses sebanyak 172.000 orang. Pencapaian target terhadap realisasi tahun 2020 dapat disajikan dalam grafik di bawah ini :



4. Indikator “*Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial*” dengan target indikator ini sebanyak 21,12% (264.034 orang) terealisasi sebanyak 21,10% (264.519 orang) atau 100.18% dari jumlah yang harus menerima pemenuhan kebutuhan sebanyak 1.249.906 orang. Pencapaian target terhadap realisasi tahun 2020 dapat disajikan dalam grafik di bawah ini :



5. Indikator “*Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*” dengan target indikator ini sebanyak 19,90% (625 orang) terealisasi sebanyak 10,16% (319 orang) atau 51,04% dari jumlah PSKS perorangan

yang harus berperan aktif sebanyak 3.141 orang. Pencapaian target terhadap realisasi tahun 2020 dapat disajikan dalam grafik di bawah ini :



6. Indikator “*Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*” dengan target indikator ini sebanyak 9.09% (44 lembaga) terealisasi sebanyak 0,41% (2 lembaga) atau 4,55% dari jumlah PSKS kelembagaan yang harus berperan aktif sebanyak 484 lembaga. Pencapaian target terhadap realisasi tahun 2020 dapat disajikan dalam grafik di bawah ini :



3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

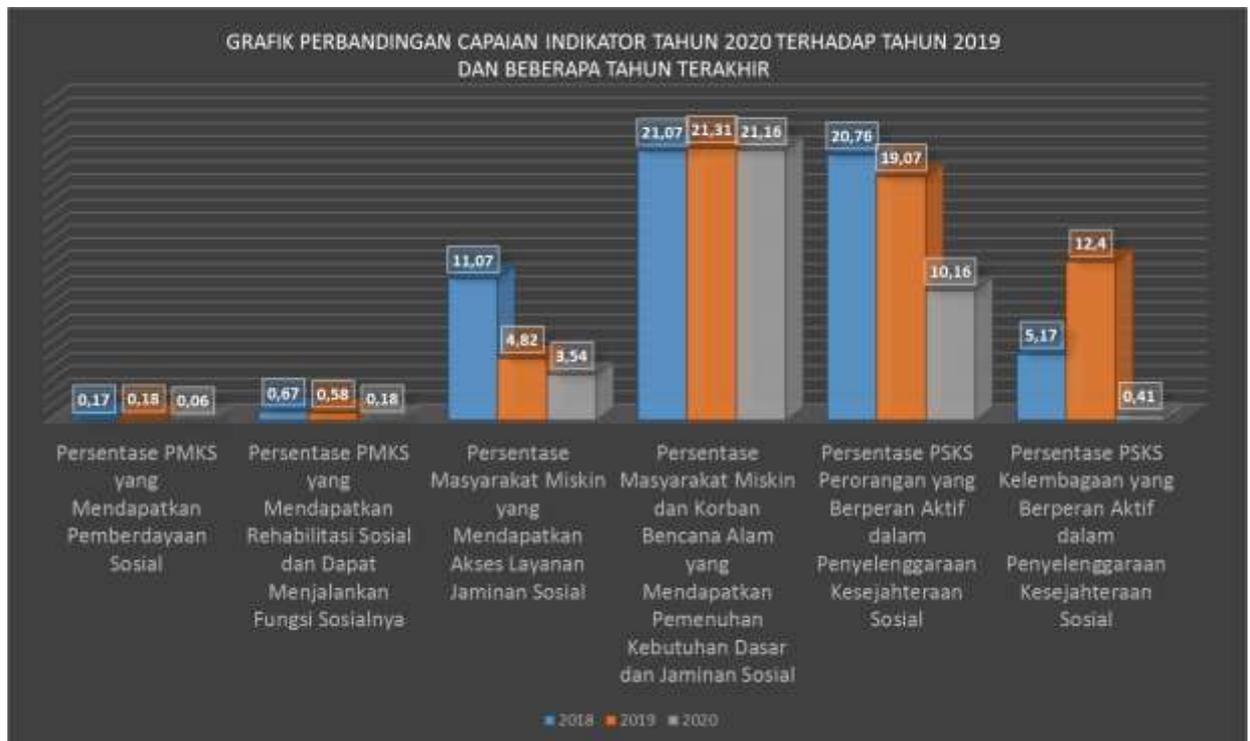
Capaian target kinerja tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja			% 2019 Thd 2020
				2018	2019	2020	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	%	0.17	0.18	0,06	-0,12
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya	%	0.67	0.58	0,18	-0,4
3	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	11.07	4.82	3,54	-1,28
4	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial	%	21.07	21.31	21,16	-0,15
5	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	20.76	19.07	10,16	-8,91
6	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	5.17	12.40	0,41	-11,99

Ket % : Persentase Penurunan atau Kenaikan dari Tahun 2019 ke 2020

Perbandingan capaian kinerja tahun tiga tahun terakhir dapat disajikan pula dalam grafik berikut :



Dari 6 indikator kinerja dapat dibandingkan bahwa capaian realisasi tahun 2020 terhadap beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator “*Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial*”. Tahun 2018 realisasi sebanyak 0.17% (1.842 orang) sedangkan tahun 2019 sebanyak 0.178% (1.923 orang) dan tahun 2020 sebanyak 0,06% (604 orang) atau mengalami penurunan sebanyak 0.06% (646 orang) dari tahun 2019. Grafik perbandingan dapat disajikan sebagai berikut :



2. Indikator “*Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya*”. Tahun 2018 realisasi sebanyak 0.67% (493 orang) sedangkan tahun 2019 sebanyak 0.58% (425 orang) dan tahun 2020 sebanyak 0,18% (134 orang) atau mengalami penurunan sebanyak 0.37% (269 orang) dari tahun 2019. Grafik perbandingan dapat disajikan sebagai berikut :



3. Indikator “*Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial*”. Tahun 2018 realisasi sebanyak 11.07% (19.047 orang) sedangkan tahun 2019 sebanyak 4.82% (8.290 orang) dan tahun 2020 sebanyak 3,54% (6094 orang) atau mengalami penurunan sebanyak 0,82% (1.406 orang) dari tahun 2019. Grafik perbandingan dapat disajikan sebagai berikut :



4. Indikator “*Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial*”. Tahun 2018 realisasi sebanyak 21.07 % (263.386 orang) sedangkan tahun 2019 sebanyak 21.31% (266.334 orang) dan tahun 2020 sebanyak 21,61% (264,519 orang) atau mengalami penurunan sebanyak 0.15% (1.815 orang) dari tahun 2019. Grafik perbandingan dapat disajikan sebagai berikut :



5. Indikator “*Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*”. Tahun 2018 realisasi sebanyak 20.76% (652 orang) sedangkan tahun 2019 sebanyak

19.07% (599 orang) dan tahun 2020 sebanyak 10,16% (319 Orang) atau mengalami penurunan sebanyak 8,91% (280 orang) dari tahun 2019. Grafik perbandingan dapat disajikan sebagai berikut :



6. Indikator “*Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*”. Tahun 2018 realisasi sebanyak 5.17% (25 lembaga) sedangkan tahun 2019 sebanyak 12.40% (60 lembaga) dan tahun 2020 sebanyak 0,41% (2 Lembaga) atau mengalami kenaikan sebanyak 8,68% (42 lembaga) dari tahun 2019. Grafik perbandingan dapat disajikan sebagai berikut :



3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja S.D Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah / RESNTRA PD

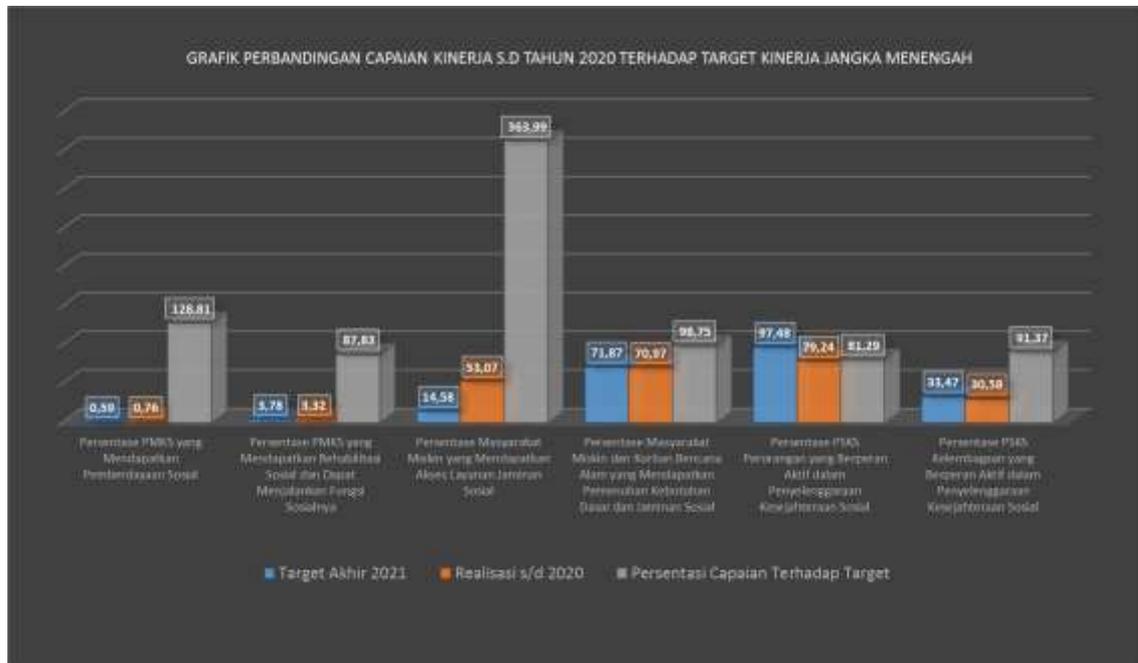
Capaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Dinas Sosial dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja S/D Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2021)	Realisasi s.d Tahun 2020	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	%	0.59	0,76	130,38
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya	%	3.78	3,32	87,83
3	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	14.58	53,07	364,04
4	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial	%	71.87	71,04	98,85
5	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	97.48	79,21	81,25
6	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	33.47	30,58	91,36

Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target jangka menengah dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah



Perbandingan capaian kinerja terhadap target jangka menengah dapat dijelaskan bahwa Sasaran Meningkatnya penanganan PMKS yang memiliki 6 indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator “*Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial*” sampai dengan tahun 2020 capaian realisasi mencapai 0.76% (8.253 orang) dari target akhir sebesar 0.59% (6.330 orang), sehingga persentase realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target jangka menengah tercapai 128.81% atau sudah terlampaui sebanyak 28.81% (1,923 orang);
2. Indikator “*Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya Tahun*” sampai dengan tahun 2020 capaian realisasi mencapai 3.32% (2.424 orang) dari target akhir sebesar 3.78% (2.760 orang), sehingga persentase realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020

- terhadap target jangka menengah tercapai 87.83%. atau masih kekurangan sebanyak 12.17% (336 orang);
3. Indikator "*Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial*" sampai dengan tahun 2020 capaian realisasi mencapai 53,07% (91.287 orang) dari target akhir sebesar 14.58% (25.076 orang), sehingga persentase realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target jangka menengah tercapai 363,99% atau sudah terlampaui sebanyak 263,99% (66,211 orang);
 4. Indikator "*Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial*" sampai dengan tahun 2020 capaian realisasi mencapai 71.04% (887.923 orang) dari target akhir sebesar 71.87% (898.262 orang), sehingga persentase realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target jangka menengah tercapai 98.85% atau masih kekurangan sebanyak 1,15% (10.339 orang);
 5. Indikator "*Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*" sampai dengan tahun 2020 capaian realisasi mencapai 79.21% (2.488 orang) dari target akhir sebesar 97.48% (3.062 orang), sehingga persentase realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target jangka menengah tercapai 81.25% atau masih kekurangan sebanyak 18.75% (574 orang);
 6. Indikator "*Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*" sampai dengan tahun 2020 capaian realisasi mencapai 30.58% (148 lembaga) dari target akhir sebesar 33.47% (162 lembaga), sehingga persentase realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target jangka menengah tercapai 91.36% atau masih kekurangan sebanyak 8.64% (14 Lembaga);

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Standar Nasional yang digunakan dalam perbandingan capaian kinerja ini merupakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial terhadap realisasi capaian kinerja tahun 2020. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2020 terhadap target kinerja nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020
Terhadap Target Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah Tahun 2020	Realisasi
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	100 % /130 Orang	128,46% /167 Orang
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % /100 Orang	129% /129 Orang
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % /552 Orang	106,5% /588 Orang
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 % /125 Orang	89,6% /112 Orang
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 % /1.000 Orang	100% /2.420 Orang

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target Layanan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sebanyak 130 orang.

Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 167 orang terdiri dari :

- a. Penelusuran Keluarga : 1 Orang
- b. Penerima alat bantu : 19 Orang
- c. Mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar : 27 Orang
- d. Reunifikasi kepada keluarga : 1 orang
- e. Rujukan kepada panti : 119 orang

$$\frac{\text{Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 167 orang}}{\text{Target Layanan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti 130 orang}} \times 100 = 128,46\%$$

2. Target Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sebanyak 100 orang.

Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 129 orang terdiri dari :

- a. Penelusuran Keluarga : 5 Orang
- b. Penerima Paket Permakanan : 7 Orang
- c. Penerima paket sandang : 2 Orang
- d. Penerima perbekalan kesehatan : 2 Orang
- e. Penerima alat bantu : 3 Orang
- f. Mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar : 86 Orang
- g. Reunifikasi kepada keluarga : 19 orang
- h. Rujukan kepada panti : 5 orang

Berdasarkan data tersebut capaian target Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 129 orang}}{\text{Target Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial sebanyak 100 orang}} \times 100 = 129\%$$

3. Target Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sebanyak 552 orang.

Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 588 orang terdiri dari :

- a. Penelusuran Keluarga : 4 Orang
- b. Penerima paket permakanan sesuai standar gizi : 260 Orang
- c. Penerima paket sandang : 3 Orang
- d. Penerima perbekalan kesehatan : 3 Orang
- e. Penerima alat bantu : 6 Orang
- f. Mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar : 61 Orang
- g. Reunifikasi kepada keluarga : 5 orang
- h. Rujukan kepada panti : 10 orang
- i. Pemenuhan kebutuhan dasar Bantuan Sosial Tunai (BST) Penanganan Covid-19 : 236 Orang

Berdasarkan data tersebut capaian target Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 588 orang}}{\text{Target Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial sebanyak 552 orang}} \times 100 = 106,5\%$$

4. Target Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sebanyak 125 orang.

Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti sebanyak 112 orang, terdiri dari :

- a. Penerima paket sandang : 3 Orang
- b. Penerima perbekalan kesehatan : 3 Orang
- c. Mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar : 49 Orang
- d. Reunifikasi kepada keluarga : 20 orang
- e. Rujukan kepada panti : 37 orang

Berdasarkan data tersebut capaian target Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Warga Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti sebanyak 112 orang}}{\text{Target Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebanyak 74 orang}} \times 100 = 89,6\%$$

5. Target Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sebanyak 1000 jiwa.

Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 2.420 jiwa, terdiri dari :

- a. Penerima paket permakanan : 1.575 Jiwa
- b. Penerima paket sandang : 240 Jiwa
- c. Penerima paket permakanan bagi kelompok rentan : 247 Jiwa
- d. Penerima layanan dukungan Psikososial : 358 Jiwa

Berdasarkan data tersebut capaian target Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten / kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 2.420 jiwa}}{\text{Target Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota sebanyak 2.420 jiwa.}} \times 100 = 100\%$$

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Setelah diberlakukannya Perubahan Indikator Kinerja, Dinas Sosial melaksanakan sasaran strategis Meningkatkan Penanganan PMKS dengan 6 indikator kinerja sasaran. Target kinerja merupakan target sasaran yang termuat dalam dokumen rencana strategis dinas. Adapun keberhasilan pencapaian realisasi target kinerja dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Pencapaian Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	0.18	0.12	0,06	42,39	0.59	9.54
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya	0.58	0.55	0,18	22,15	3.78	4.86
3	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	4.82	4.36	3,54	81,25	14.58	24.30
4	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial	21.31	21.13	21,10	99.86	71.87	29.35

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	19.07	18.31	10,19	51,20	97.48	10.42
6	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	12.40	9.09	0,41	4,55	33.47	1.23

Dari tabel di atas telah disajikan sasaran dan indikator dengan capaian kinerja yang menunjukkan pencapaian kinerja. Ke-6 indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan penanganan PMKS menunjukkan pencapaian kinerja di bawah 100%. Ditetapkannya Pandemi Covid-19 oleh pemerintah dan kebijakan refofusing anggaran daerah yang digunakan untuk menangani dampak dari Pandemi sehingga kegiatan yang telah disusun menjadi terhambat dan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Adapun capaian indikator adalah sebagai berikut :

1. Indikator “*Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial*”, target yang harus dicapai indikator ini sebanyak 0.13% (1.425 orang) dan terealisasi sebanyak 0.06% (604 orang) sehingga persentase capaian kinerja indikator adalah 42.39% dan berkontribusi sebanyak 9.54% (604 orang) terhadap target akhir 0.59% (6.330 orang).
2. Indikator “*Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya*”, target yang harus dicapai indikator ini sebanyak 0.83% (605 orang) dan terealisasi sebanyak 0.18% (134 orang) sehingga persentase capaian kinerja indikator adalah 22.15% dan berkontribusi sebanyak 4.86% (134

orang) terhadap capaian target akhir sebanyak 3.78% (2.760 orang).

3. Indikator "*Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial*", target yang harus dicapai indikator ini sebanyak 4.36% (7.500 orang) dan terealisasi sebanyak 3.54% (6.094 orang) sehingga persentase capaian kinerja indikator adalah 81.25% dan berkontribusi sebanyak 24.30% (6.094) terhadap capaian target akhir sebanyak 14.58% (25.076 orang).
4. Indikator "*Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial*", target yang harus dicapai indikator ini sebanyak 21.12% (264.034 orang) dan terealisasi sebanyak 21.10% (263.674 orang) sehingga persentase capaian kinerja indikator adalah 99.86% dan berkontribusi sebanyak 29.35% (263.674) terhadap capaian target akhir sebanyak 71.87% (898.262 orang).
5. Indikator "*Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*", target yang harus dicapai indikator ini sebanyak 19.90% (625 orang) dan terealisasi sebanyak 10.19% (320 orang) sehingga persentase capaian kinerja indikator adalah 51.20% dan berkontribusi sebanyak 10.45% (320) terhadap capaian target akhir sebanyak 97.48% (3.062 orang).
6. Indikator "*Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*", target yang harus dicapai indikator ini sebanyak 9.09% (44 lembaga) dan terealisasi sebanyak 0.41% (2 lembaga) sehingga persentase capaian kinerja indikator adalah 4.55% dan berkontribusi sebanyak 1.23% terhadap capaian target akhir sebanyak 33.47% (162 lembaga).

Secara umum pencapaian target kinerja mengalami beberapa permasalahan diantaranya :

- Recofusing anggaran untuk mengatasi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial masih sangat kurang. Jumlah pegawai yang kami miliki yaitu hanya sekitar 26

orang PNS dan 28 orang NON PNS dirasa sangat kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada bahkan para eselon IV banyak yang tidak memiliki staf dan ada pejabat structural Eselon III & IV yang pensiun.

- Dukungan keaktifan dari pengelola data tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang melakukan updating data dan menginput melalui aplikasi SIKS-NG yang kurang, seringnya berganti operator SIKS NG Desa yang membuat proses updating data terhambat. Jika dari pengelola data tidak aktif maka data usulan tidak akan bertambah karena data bersifat dinamis setiap saat bisa berubah.

Solusi :

- Memanfaatkan potensi SDM yang ada dengan maksimal dan memberikan motivasi kepada mereka untuk bekerja dengan ikhlas.
- Mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran yang ada dengan membuat program kegiatan yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga output yang dihasilkan dapat maksimal dengan jumlah anggaran yang ada.
- Terus melakukan dukungan motivasi kepada operator SIKS NG untuk lebih giat dalam updating data.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian target kinerja tidak terlepas dari sumberdaya anggaran yang mendukungnya. berikut disajikan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dalam pencapaian target kinerja tahun 2020.

Tabel 3.6
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja \geq 100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	42,39	97,07	
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya	22,15	94,56	
3	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	81,25	99,62	
4	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial	99,86	92,50	
5	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	51,20	97,13	
6	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	4,55	97,50	

3.1.7. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan program kegiatan prioritas untuk menunjang pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan merupakan kegiatan untuk menunjang capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan kerja. Berikut disajikan tabel analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Kegiatan	% Dukungan Capaian Kegiatan
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	0,06	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) komunitas adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS).	Pemberdayaan Fakir Miskin	0,002
					Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	0,003
					Pemberdayaan Warga Komunitas Adat	0,000
					Keluarga Masalah Psikologis	0,000
					Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	0,006
					Diseminasi program kesejahteraan sosial	0,044
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya	0,18	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bimbingan Sosial Restorasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	0,00
					Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Nakal Korban Narkotika/NAPZA	0,055
					Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	0,021
					Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial	0,041
					Penanganan Anak Jalanan dan Remaja Putus Sekolah	0,004
					Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	0,063
					Pelayanan Rehabilitasi Sosial WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	0,00
3	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	3,54	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	0,055
					Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT/SELARAS) bagi Masyarakat Miskin	3,237
					Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Penerima Program Perlindungan Sosial	0,252
4	Meningkatnya	Persentase	21,13	Program	Pembinaan bagi Lanjut	0,004

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Kegiatan	% Dukungan Capaian Kegiatan
1	2	3	4	5	6	
1	penanganan PMKS	Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Usia Terlantar	
					Penunjangan Program Keluarga Harapan (PKH)	8,025
					Penunjangan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, ODKB dan Anak Terlantar	0,001
					Penanganan Korban Bencana	0,126
					Penunjangan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	12,941
5	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	10,19	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	7,100
					Pembinaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	1,496
					Pembentukan Satgas Kesetiakawanan Sosial Tk. Desa Kabupaten Sukabumi	0
					Pembinaan Anggota Tagana Kabupaten Sukabumi	1,592
6	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	0,413	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	0,000
					Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0,207
					Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)	0
					Pelayanan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kedaruratan Bidang Sosial	0,207

Rincian capaian kinerja masing-masing kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target indikator “Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial” tahun 2020 sebanyak 0.13% (1.425 orang) terealisasi sebanyak 0.06% (604 orang) dari populasi PMKS yang harus mendapatkan pemberdayaan sebanyak 1.079.563 orang melalui Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS) yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

- a) Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin; dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 150.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 8.601.000,00,- terealisasi sebanyak Rp. 8.601.000,00,- / 100%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 0.002% atau 23 orang. Keluaran kegiatan adalah sebagai berikut :
- Rapat Verifikasi calon KBSM (Kegiatan Bimbingan Sosial Masyarakat) Reguler 10 Orang
 - Monitoring Calon KBSM (Kegiatan Bimbingan Sosial Masyarakat) 13 Orang
- b) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE); dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 7.630.000,00,- terealisasi sebanyak Rp. 7.630.000,00,- / 100%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 0,003% atau 30 orang. Keluaran kegiatan adalah sebagai berikut :
- Rapat Identifikasi calon binaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) 30 Orang
- c) Kegiatan Pemberdayaan Warga Komunitas Adat; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp.710.000,00,- terealisasi sebanyak Rp.710.000,00,- / 100%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 0.000% atau 3 orang. Keluaran kegiatan adalah sebagai berikut :
- Identifikasi dalam rangka pembinaan Kube di Ds. Cihamerang Kec. Kabandungan 3 Orang
- d) Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 52.574.000,- terealisasi sebanyak Rp. 49.306.000,00,- / 93.78%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 0.006% atau 65 Orang. Keluaran kegiatan ini sebagai berikut :
- Paket kadeudeuh dalam rangka hari Pahlawan 65 Orang.

e) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 1.040.000,00,- terealisasi sebanyak Rp. 980.000,00,- / 94,23%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 0.000 % atau 3 Orang Keluaran kegiatan ini sebagai berikut :

- Dalam Rangka Monitoring Pemberdayaan Bermasalah Sosial Psikologis 3 Orang

f) Kegiatan Diseminasi program kesejahteraan sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp 84.320.000,00,- terealisasi sebanyak Rp. 83.105.000,00,- / 98,56 %. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 0.044 % atau 480 Orang Keluaran kegiatan ini sebagai berikut :

- Buku PMKS & PSKS 480/pcs

2. Target indikator "*Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya*" tahun 2020 sebanyak 0.83% (605 orang) terealisasi sebanyak 0.18% (134 orang) dari populasi PMKS yang harus mendapatkan rehabilitasi sosial sebanyak 73.077 orang melalui Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

a) Kegiatan Bimbingan Sosial Restorasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 3.450.000,00,- terealisasi sebanyak Rp. 3.450.000,00,- / 100%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 0.00% atau 0 orang.

b) Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Nakal Korban Narkotika/NAPZA; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 62.700.000,00,- terealisasi sebanyak Rp. 62.700.000,00,- / 100%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 0.05% atau 40 orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Peserta kegiatan dan Rehabilitas teknis stimulan usaha bersama (KUBE) bagi anak nakal korban narkoba 40 Orang

c) Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 480.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 50.000.000,00,- terealisasi sebanyak Rp. 49.840.000,00,- / 99,68 %. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 0.02% atau 15 orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Alat bantu fisik bagi pelayana kasus penyandang disabilitas 15 Alat

d) Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 430.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 119.031.000,00,- terealisasi sebanyak Rp. 104.292.500,00,- / 87,62%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 0.04% atau 30 orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Dalam Layanan bagi palayanan rumah perlindungan bagi tuna sosial 30 Orang

e) Kegiatan Penanganan Anak Jalanan dan Remaja Putus Sekolah; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 2.180.000,00,- terealisasi sebanyak Rp. 2.170.000,00,- / 99.54%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 0.00% atau 3 orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Layanan Penanganan Anak Jalanan Putus Sekolah 3 kasus

f)Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan; dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,00,- terealisasi sebanyak Rp.99.810.000,00,- / 99.81%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 0.00% atau 0 orang.

g) Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitas Sosial bagi Anak Terlantar, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.800.000,00,- terealisasi sebanyak Rp. 41.350.000,00,- / 98,92 %. Kegiatan ini

berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 0.06% atau 46 orang.

- Sembako pelayanan anak terlantar 30 paket
- Alat bantu fisik bagi anak terlantar 16 Alat

3. Target indikator "*Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial*" tahun 2020 sebanyak 4.36% (7.500 orang) terealisasi sebanyak 3.54% (6.094 orang) dari populasi masyarakat miskin yang harus mendapatkan akses layanan jaminan sosial sebanyak 172.000 orang melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

- a) Kegiatan Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT/SELARAS) bagi Masyarakat Miskin; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 355.000.000,00,- terealisasi sebanyak Rp. 353.661.000,00,- / 99,62%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target indikator sebesar 3,24% atau 5.567 rekomendasi. Keluaran kegiatan adalah sebagai berikut:
 - layanan rekomendasi program perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 5.567 rekomendasi.
- b) Kegiatan Identifikasi dan Evaluasi Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp.19.000.000,00,- terealisasi sebanyak Rp.18.970.000,00,- / 99.84%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target indikator sebesar 0,05% atau 94 orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS RTLH) Sebanyak 94 Orang.
- c) Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Penerima Program Perlindungan Sosial; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 850.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp.

99.000.000,00,- terealisasi sebanyak Rp. 98.091.000,00,- / 99.08%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target indikator sebesar 0.25 % atau 433 orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peserta kegiatan Bimtek Pemutakhiran data Sebanyak 433 Orang.

4. Target indikator "*Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial*" tahun 2020 sebanyak 21.12% (264.034 orang) terealisasi sebanyak 21.10% (263.674 orang) dari populasi masyarakat miskin yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 1.249.906 orang melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

a. Kegiatan Pembinaan Lanjut Usia Terlantar; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 480.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 72.000.000,00,- terealisasi sebanyak Rp. 71.950.000,00,- / 99,93%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target indikator sebesar 0,03% atau 335 orang. Terealisasi 0.00% atau 44 Orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- paket sembako dalam rangka layanan penelusuran keluarga lanjut usia terlantar 25 Paket
- Alat bantu bagi lanjut usia terlantar 19 Alat

b. Kegiatan Penunangan Program Keluarga Harapan (PKH); dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 1.434.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp, 1.409.920.000,00, - atau 98,32 %. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target indikator sebesar 7.92% atau 98,935 orang. Terealisasi sebanyak 8.02% atau 100.301 KPM. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- sasaran pembinaan penerima program keluarga harapan kabupaten sukabumi 100.301 KPM.

c. Kegiatan Penunjang Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, ODKB dan Anak Terlantar dengan anggaran Rp. 100.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 14.355.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 12.855.000,00,- atau 89,55 %. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target indikator sebesar 0.02% atau 217 orang. Terealisasi sebanyak 0.00% atau 9 orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peserta rapat evaluasi pendamping sosial sebanyak 9 orang.

d. Kegiatan Penanganan Korban Bencana; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 481.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 339.920.000,00,- atau 70,67%. Kegiatan penanganan korban bencana berkontribusi terhadap pencapaian target indikator sebesar 0,08 % atau 1000 orang. Terealisasi sebanyak 0.126% atau 1575 orang. Keluaran kegiatan ini adalah : pengadaan bufferstock bagi korban bencana sebanyak 1.500 paket

e. Kegiatan Penunjang Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp. 250.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 247.907.800,00,- atau 99,16 %. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target indikator sebesar 13.08 % atau 163.547 orang. terealisasi sebesar 12.94% atau 161.745 KPM. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut

- sasaran pembinaan penerima manfaat program bantuan pangan non tunai 161.754 KPM.

5. Target indikator "*Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*" tahun 2020 sebanyak 19.90% (625 orang) terealisasi sebanyak 10.19% (320 orang) dari PSKS perorangan yang harus berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebanyak 3.062 orang

melalui Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.375.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp.378.200.000,00,- terealisasi sebanyak Rp.368.395.000,00,- / 97,41%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target indikator sebesar 1,50% atau 47 orang. Kemudian ditunjang oleh kegiatan pusat yang melakukan pembinaan terhadap 69 orang sehingga total layanan 116 orang atau 3,69%. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :
 - Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mengikuti rapat pembinaan sosial 47 orang;
 - Jumlah TKSK yang mengikuti kegiatan Bechmarking TKSK Kabupaten Sukabumi 47 orang.
 - b. Kegiatan Pembentukan Satgas Kesetiakawanan Sosial Tk. Desa Kabupaten Sukabumi; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp.44.000.000,00,- terealisasi sebanyak Rp.43.250.000,00,- / 98,30%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target indikator sebesar 1,59% atau 50 orang. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang tergabung dalam pembentukan satuan tugas kesetiakawanan sosial tingkat desa 50 orang.
 - c. Kegiatan Pembinaan Anggota Tagana Kabupaten Sukabumi; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp.131.000.000,00,- terealisasi sebanyak Rp.128.500.000,00,- / 98,09%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target indikator sebesar 1,59% atau 50 orang. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah anggota TAGANA yang mengikuti pembinaan 50 orang.
6. Target indikator "*Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*" tahun 2019 sebanyak 9.09% (44 lembaga) terealisasi sebanyak 12.40%

(lembaga) dari PSKS kelembagaan yang harus berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebanyak 484 lembaga melalui Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp.200.000.000,00,- terealisasi sebanyak Rp.196.115.000,00,- / 98,06%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target indikator sebesar 10,54% atau 51 lembaga. Kemudian ditunjang oleh kegiatan pusat yang melakukan pembinaan terhadap lembaga PSKS sebanyak 6 lembaga, sehingga total pembinaan kelembagaan sebanyak 57 lembaga atau 11,78%. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :
 - Jumlah pengurus LKS yang mengikuti kegiatan peningkatan pelayanan sosial 50 orang;
 - Jumlah LKS yang mendapatkan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pelayanan sosial 6 LKS;
 - Jumlah anak yang mengikuti khitanan masal 50 anak;
 - Jumlah pengadaan paket sembako dalam rangka kegiatan santunan LKKS ke panti 50 paket.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); dengan pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,00,- terealisasi sebanyak Rp. 100.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp.143.340.000,00,- / 95,56%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target indikator sebesar 0,21% atau 1 lembaga. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :
 - Jumlah mitra kerja dinas yang mendapatkan informasi penyelenggaraan LK3 melalui kegiatan Diseminasi Penyelenggaraan LK3 di Kabupaten Sukabumi 50 orang;

- Jumlah pembahasan kasus/case conference dalam penanganan kasus 30 kasus.
- c. Kegiatan Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA); dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00,- sesudah perubahan sebesar Rp.75.000.000,00,- terealisasi sebanyak Rp.72.280.000,00,- / 96,37%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target indikator sebesar 0,21% atau 1 lembaga. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Jumlah personil yang terlibat dalam rapat persiapan hari lanjut usia nasional (HALUN) 15 orang/2 keg;
 - Jumlah kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN) Tingkat Kabupaten Sukabumi 1 kegiatan;
 - Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan sembako dalam rangka kegiatan LLI 75 orang.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran per- indikator kinerja dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	154.875.000	150.332.000	97,07
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya	282.121.000	266.762.500	94,56
3	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	355.000.000	353.661.000	99,62

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial	2.251.355.000	2.082.552.800	92,50
5	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	377.779.750	366.940.450	97,13
6	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	394.444.300	384.567.800	97,50

Target dan realisasi anggaran per-indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat dalam grafik berikut :



Dari tabel dan grafik di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator “*Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial*” mendapatkan anggaran sebesar Rp. 630.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 154.875.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

150.332.000 atau 97,07 %. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) komunitas adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS) yang mendapatkan persentase anggaran sebesar 3,25 % dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

2. Indikator "*Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya*" mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.990.750.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 282.121.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 266.762.500,- atau 94,56 %. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan persentase anggaran sebesar 5,92 % dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
3. Indikator "*Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial*" mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 355.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 353.661.000,- atau 99,62 %. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang mendapatkan persentase anggaran sebesar 7,45 % dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
4. Indikator "*Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial*" mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.880.000.000 setelah perubahan sebesar Rp. 2.251.355.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.082.552.800,- atau 92,50 %. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang mendapatkan persentase anggaran sebesar 47,22 % dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
5. Indikator "*Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*" mendapatkan anggaran sebesar Rp. 675.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 377.779.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 366.940.450,- atau 97,13 %. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan persentase anggaran sebesar 7,92 % dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

6. Indikator “*Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*” mendapatkan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 394.444.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 384.567.800,- atau 97,50 %. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan persentase anggaran sebesar 8,27 % dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Jika dilihat dari persentase realisasi penyerapan anggaran, dapat diurutkan dari program prioritas dengan angka penyerapan paling tinggi adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan angka persentase realisasi sebesar 97.32%. Program ini mendukung capaian kinerja sasaran sebanyak 51.04% (319 orang) melalui indikator Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan 4.55% (2 lembaga) melalui indikator Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) komunitas adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS) dengan angka persentase realisasi sebesar 97.07%. Program ini mendukung capaian kinerja sasaran sebanyak 42.39% (604 orang) melalui indikator Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial.
3. Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan angka persentase realisasi sebesar 94.56%. Program ini mendukung capaian kinerja sasaran sebanyak 22.15% (134 orang) melalui indikator Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan angka persentase realisasi anggaran mencapai 93.47%. Program ini mendukung capaian kinerja sasaran sebanyak 100.11% (264.334 orang) untuk indikator Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial, dan 81.25% (6.094 orang) untuk indikator Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial.

Secara umum pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran untuk kegiatan yang ada di Dinas Sosial sudah baik, dengan memberikan kontribusi yang positif terhadap terhadap target RENSTRA tahun berjalan ataupun target jangka menengah daerah.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Secara umum simpulan dari pencapaian target kinerja tahun 2020 terhadap indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi 2020 tidak dapat terpenuhi sesuai dengan harapan. Sasaran strategis Meningkatnya penanganan PMKS memiliki enam indikator kinerja yang menunjang terhadap capaian indikator kinerja utama daerah. Capaian realisasi kinerja ke enam indikator menunjukkan angka capaian rata-rata 50,28%.

Persentase capaian indikator “Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial” terealisasi sebesar 42.39% dengan dukungan penyerapan anggaran sebesar 97.07% melalui Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) komunitas adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan Kepahlawanan & Kesetiakawanan Sosial (K2KS). Sedangkan Persentase capaian indikator “Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya” terealisasi sebesar 22.15% dengan dukungan penyerapan anggaran sebesar 94.56% melalui Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Persentase capaian indikator “Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial” terealisasi sebesar 81.25% dengan dukungan penyerapan anggaran sebesar 99.62% dan persentase capaian indikator “Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial” terealisasi sebesar 100.05% dengan dukungan penyerapan anggaran sebesar 92.50% melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Persentase capaian indikator “Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” terealisasi sebesar 51.20% dengan dukungan penyerapan anggaran sebesar 97.13%, dan Persentase capaian indikator “Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” terealisasi sebesar 4.55% dengan dukungan

penyerapan anggaran sebesar 97.50% melalui Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

4.2. Saran

Segala dukungan dan bantuan dari semua pihak tentu kami butuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan demi pembangunan Kabupaten Sukabumi. Namun ada beberapa yang menjadi harapan bagi kami di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi demi terselenggaranya kesejahteraan sosial di Kabupaten Sukabumi, diantaranya :

- a) Prioritas sumberdaya manusia sosial untuk menunjang kinerja dan tata kelola pemerintahan di bidang sosial;
- b) Sarana dan prasarana layanan bidang sosial untuk menunjang layanan standar pelayanan minimal daerah di Kabupaten Sukabumi;
- c) Sarana dan prasarana pengelolaan data untuk menunjang layanan rekomendasi semua program perlindungan dan jaminan sosial baik untuk pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi;
- d) Prioritas anggaran untuk melaksanakan program prioritas dan layanan wajib dasar.

Sukabumi Februari 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sukabumi.



III. TEJA SUMIRAT. MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660330 199303 2 002

